



URGENSI DAN LATAR BELAKANG

Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada *over capacity*-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase *over capacity* sebesar 109%.

Layanan bantuan hukum merupakan salah satu program prioritas pemerintah tahun 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat meminimalisir setiap warga yang berperkara untuk diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, yakni secara nonlitigasi. Jalur non litigasi diantaranya berupa kegiatan preventif seperti Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan represif adjudikatif berupa penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan resolusi konflik lainnya yang pada prinsipnya diselesaikan di luar pengadilan.

Berdasarkan dengan hal tersebut, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat dijadikan sebagai *Primary Legal Aid* yang mengarahkan bahwa tahap awal dari setiap penyelesaian perkara harus melalui jalur nonlitigasi terlebih dahulu. Data kajian *Legal Needs Survey* yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) yang bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2019, 60% pihak yang paling sering dipilih oleh masyarakat di pedesaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan selain keluarga antara lain ialah ketua adat, tokoh agama, atau ketua komunitas. Artinya Kepala Desa yang rata-rata sekaligus sebagai ketua adat, tokoh agama, atau ketua komunitas di masyarakat desa dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dari aspek ekonomi, Kepala Desa pun dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama investasi, pariwisata, dan lapangan kerja. Tumbuhnya ekonomi menjadikan desa menjadi sejahtera yang secara tidak langsung mengurangi pelanggaran hukum di tengah masyarakat. Maka dari itu, bagi Kepala Desa/Lurah yang telah berperan dalam penyelesaian perkara secara non litigasi diberikan penghargaan *Non Litigation Peacemaker* dan bagi Desa/Kelurahan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (investasi, pariwisata, dan lapangan kerja) mendapatkan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*. Sedangkan bagi Kepala Desa/Lurah yang menjadi *Non Litigation Peacemaker* dan Desa/Kelurahan yang menjadi *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* mendapatkan Anugerah *PARALEGAL JUSTICE AWARD*.



PENDAFTARAN & SELEKSI ADMINISTRASI

Pengumuman dan Pendaftaran diperpanjang hingga 12 April 2023 yang dilakukan secara elektronik dengan link formulir yang disiapkan Panitia dengan persyaratan :



Jabatan Kepala Desa/Lurah

Sedang menduduki jabatan Kepala Desa/Lurah (dibuktikan dengan SK)



KTP

KTP discan dan diunggah pada link yang ditentukan panitia



DRH

Daftar Riwayat Hidup dengan data ter-update



Pas Foto 4X6

Foto 4X6 berwarna *background* putih diunggah pada link yang ditentukan panitia



Surat Perintah/Tugas

Mengunggah Surat Perintah/Tugas Mengikuti Kegiatan dalam bentuk file Pdf yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang



Pengalaman Peran Paralegal

Bukti pengalaman peran Hakim Perdamaian di Desa berbentuk : Narasi cerita pengalaman singkat maks 2 halaman, Video portofolio (durasi maksimal 2 menit), link berita/media massa, dan/atau dokumentasi bukti bentuk lainnya



SELEKSI ADMINISTRASI & AUDISI



Regional Barat

- Pulau Sumatera;
- Pulau Jawa;



Regional Tengah

- Pulau Kalimantan;
- Pulau Sulawesi;



Regional Timur

- Pulau-pulau lainnya wilayah timur hingga papua;



- Dilakukan setelah Seleksi Administrasi dari Persyaratan Pendaftaran;
- Proses dilakukan serentak;
- Rentang waktu 1 pekan, minggu ke-1 bulan maret;
- Peserta lulus lanjut ke Diklat di *Paralegal Academy* BPHN.

PARALEGAL ACADEMY

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal bagi Kepala Desa/Lurah setelah Lulus Audisi



9 Materi Bahan Ajar

9 Materi disertai Pre-Test dan Post-Test

3 Hari Diklat

3 hari penyelenggaraan disertai Pameran

Modul Diklat

Penyusunan Modul disertai soal-soal Pre-Test
dan Post-Test

Narasumber/Pengajar

9 Pengajar masing-masing 120 menit *on-class*

Periodesasi Diklat

Perlu dibatasi jumlah Peserta pada setiap kelas
dan angkatan

Pedoman *Paralegal Academy*

Sebagai dasar penyelenggaraan dan
manajemen pelaksanaan Diklat khusus bagi
Kepala Desa

Seluruh peserta tetap mendapatkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Desa

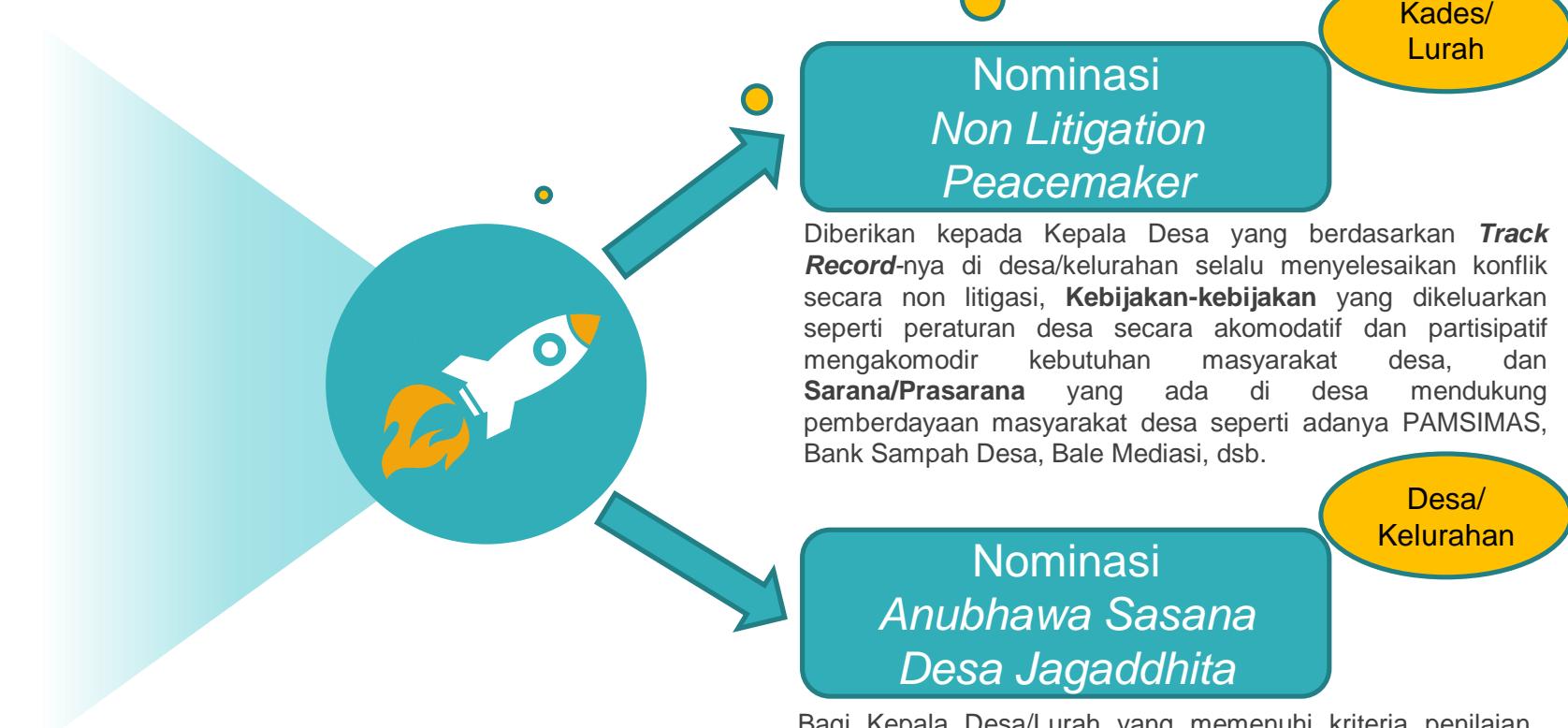
ELIMINASI

Dilakukan setelah Peserta mengikuti Diklat dan Lulus Ujian

01
Full Absensi Diklat

02
Mengikuti Pre-Test & Post-Test

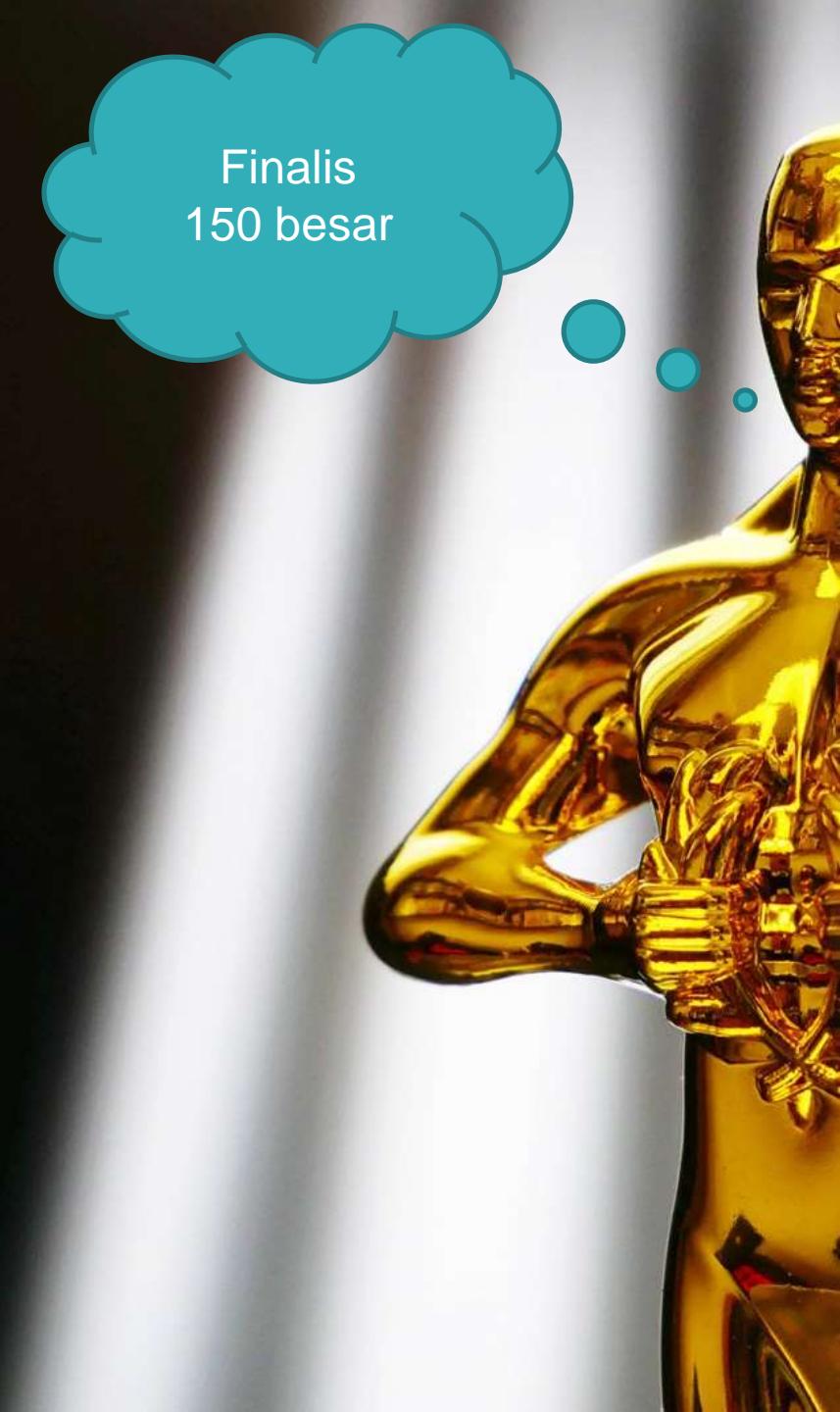
03
Presentasi Kompetensi dan Eksistensi Hakim Perdamaian Desa (Portofolio) dan Kualifikasi Desa Pendorong Ekonomi



Target 150 - 300

Kades/ Lurah

Desa/ Kelurahan



Finalis
150 besar

KRITERIA



Track Record



Kebijakan
Desa/Kelurahan



Sarpras
Desa/Kelurahan

NOMINASI PARALEGAL JUSTICE AWARD

Paralegal Justice Award diberikan kepada Kepala Desa yang memenuhi kriteria sebagai ***Non Litigation Peacemaker*** dan ***Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita***

Anugerah ini dapat dijadikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk membuktikan kepada masyarakat, media, dan pengambil kebijakan di pusat bahwa peran Kepala Desa hadir dalam setiap permasalahan hukum dan sebagai wadah pertimbangan untuk tambahan masa jabatan menjadi 9 tahun.

ANGGARAN

APBN



- Pelaksanaan *Paralegal Academy* selama 3 hari 2 malam;
- Penganugerahan *Paralegal Justice Award (Non Litigation Peacemaker & Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita)*;
- Akomodasi (Hotel dan Paket Meeting).

APBD/APBDes/DD



- Perjalanan Dinas Peserta (Kepala Desa);

**PENGANUGERAHAN PARALEGAL JUSTICE AWARD KEPADA KEPALA DESA SEBAGAI NON LITIGATION PEACEMAKER DAN
PERESMIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TEMATIK DENGAN ANUGERAH ANUBHAWA SASANA DESA JAGADDHITA**

No.	Agenda	Waktu																Keterangan
		Februari				Maret				April				Mei				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Persiapan pelaksanaan	■	■	■	■													
2	Pengumuman dan pendaftaran peserta		■	■	■	■	■	■	■									10 Feb 2023 s.d.12 April 2023
3	Seleksi Administrasi							■	■	■								13 s.d.30 April 2023
4	Audisi Peserta									■	■							01 s.d. 14 Mei 2023
5	Pengumuman Hasil Audisi										■							15 Mei 2023
6	Persiapan Paralegal Academy									■	■							Penentuan Venue dan metode pelaksanaan
7	Paralegal Academy											■	■					28 Mei 2023 s.d. 31 Mei 2023
8	Eliminasi											■	■					31 Mei 2023
9	Nominasi Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita											■	■					1 Juni 2023 (Siang)
10	Penyerahan Anugerahan Paralegal Justice Award												■					1 Juni 2023 (Malam)



Dalam rangka memberi kesempatan
bagi para Kepala Desa/Lurah

**PENDAFTARAN
PARALEGAL JUSTICE AWARD
DIPERPANJANG !!!**

Sampai dengan **12 APRIL 2023**

<https://bit.ly/ParalegalJusticeAward>

**KEPALA DESA/LURAH
SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA!!**



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id

Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)





Persyaratan:

- ✓ SK Kepala Desa/Lurah
- ✓ KTP
- ✓ Daftar Riwayat Hidup
- ✓ Foto
- ✓ Surat Perintah/Tugas
- ✓ Video Praktik Penyelesaian Konflik

Reward:

- Pendidikan Paralegal Desa
- Sertifikat Paralegal Desa
- Piagam Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita
- Piala Anugerah **Paralegal Justice Award**

DAFTAR SEKARANG!
<https://bit.ly/ParalegalJusticeAward>



 **Batas Pendaftaran**
8 Maret 2023



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id

Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)





Persyaratan Non Litigation Peacemaker

1. Masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa/Lurah dibuktikan dengan SK
2. Kartu Tanda Penduduk yang di-scan dan diunggah pada link
3. Foto 4x6 dengan berpakaian dinas Kepala Desa/Lurah background putih
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Bukti pengalaman Kepala Desa/Lurah dalam menyelesaikan permasalahan hukum di desa berbentuk:
 - a. cerita pengalaman singkat maksimal 2 halaman;
 - b. video dokumentasi kerja (durasi maksimal 2 menit);
 - c. link berita/media massa;
 - d. dokumen bukti bentuk lainnya;
 - e. Surat Perintah/Surat Tugas.



Persyaratan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita

1. Merupakan Desa Sadar Hukum/Calon Desa Sadar Hukum
2. Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan/atau Camat
3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum
4. Dokumentasi penyelesaian permasalahan/sengketa di luar proses hukum oleh lembaga/takoh masyarakat desa
5. Dokumentasi hasil kerja terkait upaya kelayakan investasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja
6. Surat Pernyataan calon penerima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita yang tidak tersangkut kasus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya.



Lulusan terbaik *Paralegal Academy* akan mendapatkan penghargaan Kepala Desa/Lurah sebagai
Non Litigation Peacemaker



Tanggal Penting

Pengumuman dan Pendaftaran

10 Februari s.d. 8 Maret 2023

Seleksi Administrasi

13 s.d. 24 Maret 2023

Audisi Peserta

27 Maret s.d. 14 April 2023

Pengumuman Hasil Audisi

5 Mei 2023

Paralegal Academy

28 s.d. 31 Mei 2023

Eliminasi Paralegal Academy

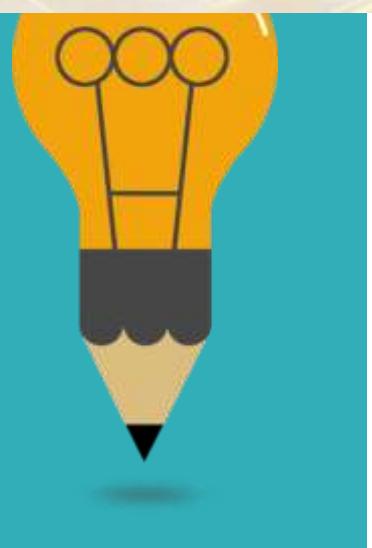
31 Mei 2023

Malam Penganugerahan

1 Juni 2023



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id



Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)



Desa/Kelurahan Terbaik akan mendapatkan penghargaan
Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita

Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* yang juga mendapatkan *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita* akan diberikan:

PARALEGAL JUSTICE AWARD



Informasi Selengkapnya di:
www.bphn.go.id

Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)



Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)





PIALA bagi Penerima
*Paralegal Justice
Award*



Uniform bagi Kepala
Desa/Lurah sebagai
Non Litigation Peacemaker



PIN bagi Kepala Desa/Lurah
sebagai *Non Litigation
Peacemaker*

On Progress :

- Sertifikat Gelar Non Akademik oleh Menteri Hukum dan HAM (NL.P);
- Medali *Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita*.